



Diskursus Standar Kemiskinan Dalam Persepektif Fiqih

Amin Nur Khalid ^{1,*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: aminnurkhalid@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

Poverty Standards
Fiqh Perspective
Zakat Nishab

ABSTRACT

The Standard Discourse of Poverty in the Perspective of Islamic Jurisprudence; This research aims to identify the standards of poverty from the perspective of Islamic jurisprudence. The research concludes that there are two approaches that can be used in determining the poverty line standards based on the perspective of Islamic jurisprudence, namely; first, the approach of had al kifayah, and second, the approach of nisab zakat (nisab zakat of gold and silver or nisab zakat of agriculture).

KATA KUNCI

Standar Kemiskinan
Perspektif Fiqih
Nishab Zakat

ABSTRAK

Diskursus Standar Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqih Islam; Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui standar kemiskinan dalam perspektif fiqih Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan standar garis kemiskinan berdasarkan perspektif fiqih Islam, yaitu; pertama, pendekatan had al kifayah, dan kedua, pendekatan nishab zakat (nishab zakat emas dan perak atau nishab zakat pertanian had al kifayah, dan kedua, pendekatan nishab zakat (nishab zakat emas dan perak atau nishab zakat pertanian).

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
01 Mei 2022	26 Mei 2022	28 Mei 2022	30 Mei 2022

PENDAHULUAN

Standar garis kemiskinan diperlukan untuk menentukan seseorang masuk katagori miskin atau tidak. Beberapa lembaga telah mengeluarkan standar garis kemiskinan, seperti Bank Dunia, BPS, BKKBN, dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan standar garis kemiskinan. Namun penetapan standar kemiskinan oleh lembaga-lembaga tersebut di atas telah mengundang sejumlah kritik, di antaranya adalah: **pertama**, angka yang dipatok sangat kecil dan kurang logis seperti garis kemiskinan yang ditebtuka oleh BPS. **Kedua**, sulitnya menghitung indikator-indikator standar kemiskinan versi lembaga-lembaga tersebut.

Melihat pada kritik atas standar garis kemiskinan tersebut di atas, maka perlu diusulkan standar kemiskinan baru berdasarkan perspektif fikih Islam (syariah). Standar kemiskinan dalam perspektif fikih Islam ini sangat diperlukan oleh lembaga-lembaga Islam yang memiliki konsen terhadap orang-orang miskin, seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Salah satu tugas OPZ adalah menyalurkan program-program zakat ke kelompok masyarakat fakir dan miskin. Oleh karena itu, setiap OPZ wajib memiliki standar penilaian kemiskinan objektif untuk mengatasi kemiskinan. Kesalahan dalam menentukan indikator akan menyebabkan ketidaktepatan penyaluran dan zakat.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Kemiskinan

Berdasarkan BPS,¹ definisi kemiskinan dapat dibedakan secara asal penyebabnya dan secara konseptual. Secara asal penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Adapun secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan), kemiskinan juga terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Kemiskinan kultural

Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.² Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.³ Kemiskinan kultural juga berkaitan dengan sikap mental yang dimiliki orang miskin seperti menerima kemiskinan mereka sebagai takdir sehingga mereka enggan untuk berusaha memperbaiki kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.⁴

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari

¹ . *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hal.5

² . *Ibid.*

³ . *Ibid*,hal.9

⁴ . Tsani, Tiara, *Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan)*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2010: tidak diterbitkan, hal.11.

perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain ”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.⁵ Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.⁶

Kemiskinan Relatif

Perbedaan antara kemiskinan relatif dengan kemiskinan absolut adalah terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif adalah standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif.⁷

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.⁸

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin.⁹ Apabila suatu negara kaya memiliki angka kemiskinan resmi (*official figure*) yang sama dengan angka kemiskinan resmi negara miskin yaitu sama-sama bernilai 15 persen, artinya banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Maka dari itu, garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.¹⁰

Garis kemiskinan relatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin dengan menyesuaikannya dengan tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Ketika negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya mejadi lebih tinggi. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan per kapita di bawah 50 persen dari rata-

⁵. BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hal.5

⁶. *Ibid*, hal.8-9.

⁷. *Ibid*,hal.5.

⁸. BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hal.6

⁹. *Ibid*.

¹⁰. Tsani, Tiara, *Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan)*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2010: tidak diterbitkan , hal.8-9

rata pendapatan. Tatkala rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.¹¹

Kemiskinan Absolut

Standar penilaian kemiskinan secara absolut adalah standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.¹² Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan.¹³ Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.¹⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan mengacu kepada garis kemiskinan.¹⁵

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.¹⁶

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 perkapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 perkapita per hari, yaitu lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.¹⁷

¹¹. Ibid, hal.9

¹². BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hal.5-6.

¹³. IZDR 2012, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, Ciputat; IMZ 2012, hal.37.

¹⁴. Ibid, hal.7.

¹⁵. Mujiran (2009) dalam Nia Purnamasari "Analisis Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Studi Kasus: Pusat Zakat Umat LAZ Persis Garut)", Skripsi Pada FEM IPB 2010, hal.9.

¹⁶. BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hal.7.

¹⁷. Ibid, hal.8

STANDAR GARIS KEMISKINAN

Standar garis kemiskinan diperlukan untuk menentukan seseorang masuk kategori miskin atau tidak. Standar garis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu standar garis kemiskinan secara konvensional dan standar garis kemiskinan menurut perspektif syariah.

Standar Garis Kemiskinan Konvensional (Non Syariah)

Ada beberapa standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, diantaranya yaitu:

1. Versi BPS¹⁸

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional).

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

Selain menerapkan pendekatan pengeluaran minimum dari kebutuhan dasar seperti tersebut di atas dalam menentukan kemiskinan, BPS juga menerapkan pendekatan yang berdasarkan pada Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin tahun 2000 (SPKPM 2000). Berdasarkan SKPM tersebut diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan.¹⁹

¹⁸. BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hlm. 31-32

¹⁹. Uraian tentang 8 variabel tersebut lihat BPS, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011*, Jakarta: BPS 2011, hlm.17

2. Versi Bank Dunia ²⁰

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu US \$ 1 perkapita per hari atau US \$ 2 perkapita per hari. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli), bukan nilai tukar resmi (exchange rate).

3. Versi BKKBN ²¹

BKKBN dalam mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Mereka yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).

Menurut BKKBN, Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu: (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing, (2) seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih, (3) Seluruh dan bepergian, (4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, (5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

4. Versi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ²²

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) adalah standar yang digunakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengukur upah minimum seorang buruh. Artinya, mereka yang berpenghasilan dibawah standar ini akan digolongkan sebagai orang miskin. Dari hasil perhitungan indikator-indikator²³ yang digunakan untuk mengukur KHM tersebut diperoleh bahwa kebutuhan hidup minimum seorang individu adalah Rp. 1.290.000,- per bulan untuk tahun 2011.

PEMBAHASAN

Standar Garis Kemiskinan Menurut Perspektif Fikih Islam (Syariah)

Penetapan standar kemiskinan seperti tersebut di atas telah mengundang sejumlah kritik, di antaranya adalah:

1. Angka yang dipatok sangat kecil dan kurang logis.²⁴ Sebagai contoh, pada bulan Maret tahun 2020, BPS menetapkan orang miskin sebagai mereka yang berpenghasilan di bawah Rp.454.652,- per bulan.²⁵ Angka ini sama dengan Rp.15,155,- per hari untuk semua keperluan, termasuk makan dan non-makanan. Orang yang pendapatannya berada sedikit saja di atas garis kemiskinan tersebut tidak dianggap sebagai orang miskin.

²⁰. Ibid, hlm. 8

²¹. Ibid, hlm. 15-16.

²². Tanjung, Hendri "Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011, hlm. 62.

²³. Untuk uraian indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur KHM lihat ibid, hlm. 71-73.

²⁴. Ibid, hlm. 62.

²⁵. bps.go.id, Presentase Penduduk Miskin Maret 2020, dirilis pada 15-07-2020.

2. Sulitnya menghitung indikator-indikator standar kemiskinan tersebut di atas. Sebagai contoh, untuk angka konsumsi beras/daging/ikan dengan kualitas sedang yang dipakai untuk menghitung KHM, maka jenis beras/daging/ikan apa yang dipakai untuk mengukur kualitas sedang tersebut.²⁶ Begitu juga halnya dengan indikator – indikator keluarga sejahtera versi BKKBN, pengukurannya sangat sulit.

Melihat pada kritik atas standar garis kemiskinan tersebut di atas, maka perlu diusulkan standar kemiskinan baru berdasarkan perspektif syariah. Menurut Beik dan Baga²⁷, ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan standar garis kemiskinan berdasarkan perspektif syariah ini, yaitu; **pertama**, pendekatan had al kifayah, dan **kedua**, pendekatan nishab zakat. Berikut penjelasan kedua pendekatan tersebut: ²⁸

1. Pendekatan had al-kifayah

Had al kifayah satu konsep yang mendefinisikan batas kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas ini adalah pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh negara.

Sejumlah lembaga zakat di Malaysia telah menggunakan had al kifayah sebagai parameter standar kemiskinan. Penggunaan had al kifayah didasarkan pada sejumlah argumentasi, diantaranya adalah : *pertama*, garis kemiskinan hanya difokuskan pada tingkat pendapatan dan pengeluaran berdasarkan standar makanan dan bukan makanan, sementara dalam maqashid as-syariah ada lima faktor yang perlu diproteksi, yaitu agama, kekayaan, akal, keturunan, dan diri/jiwa. Karena itu, had al kifayah diyakini lebih bersifat komprehensif, holistik dan lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan garis kemiskinan yang ada; *kedua*, had al kifayah menghitung berapa tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan garis kemiskinan hanya berbicara pada aspek pendapatan minimal yang diperlukan.

Contoh perhitungan had al kifayah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS). Dalam publikasi laporan LZS (2010), basis perhitungan had al kifayah ini adalah rumah tangga, yang terdiri atas kepala rumah tangga, orang dewasa yang bekerja, orang dewasa yang menganggur (berusia di atas 18 tahun), anak berusia 1-6 tahun, dan anak berusia 7-17 tahun. Untuk kepala rumah tangga dan orang dewasa yang bekerja, komponen kebutuhan hidup yang dihitung adalah perumahan, makanan, pakaian, biaya kesehatan, dan transportasi. Nilainya masing-masing RM 680 untuk kepala keluarga dan RM 420 untuk orang dewasa yang bekerja. Angka ini adalah kebutuhan hidup bulanan.

Adapun untuk orang dewasa yang menganggur, nilai kebutuhan hidup bulannya mencapai angka RM 240. Sedangkan kelompok anak usia 7-17 tahun dan 1-6 tahun, nilai kebutuhan hidup masing-masingnya mencapai angka RM 180 dan RM 130 setiap bulannya. Melalui pendekatan ini, standar had al kifayah sebuah rumah tangga setiap bulannya mencapai angka RM 1.650. Sehingga, setiap rumah tangga yang pendapatan bulannya

²⁶ Tanjung, Hendri "Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011,, hlm.62-63 (dengan perubahan).

²⁷ Beik, Irfan Syauqi dan Baga, Lukman M, "Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin", Ciputat: IMZ 2011, hal.6

²⁸ Ibid, hal.6-10 (dengan beberapa perubahan).

kurang dari angka tersebut dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat. Apabila dalam rumah tangga tersebut terdapat anak cacat atau mengidap penyakit kronis, maka nilai had al kifayah-nya naik maksimal sebesar RM 590, sehingga standar keseluruhannya mencapai angka RM 2.240.

2. Pendekatan nishab zakat

Nishab zakat merupakan parameter penetapan status seseorang apakah menjadi muzaki ataupun menjadi mustahik. Karena itu maka kriteria nishab zakat dapat dipakai untuk menentukan batas kemiskinan. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana menentukan standar nishab yang akan digunakan. Jika merujuk pada standar nishab zakat hasil profesi maka ada 2 opsi, yaitu pertama menggunakan standar nishab zakat emas-perak, dan kedua, menggunakan standar nishab zakat pertanian.

a. Standar nishab emas dan perak

Jika nishab emas-perak yang digunakan dalam konteks perekonomian Indonesia,²⁹ dengan asumsi harga emas adalah Rp. 500.000,- per gram, maka garis kemiskinan mencapai Rp. 3.540.000,- per bulan per rumah tangga³⁰ atau Rp. 907.000,- per bulan per kapita. Angka ini setiap tahunnya akan berubah sesuai dengan pergerakan harga emas.

Dengan demikian, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan per bulan kurang dari Rp. 3.540.000,- atau dalam konteks perkapita, seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang Rp. 907.000,- per bulan atau Rp. 30.257,- per hari (USD 3,52/hari).

b. Standar nishab pertanian

Jika nishab zakat pertanian yang digunakan,³¹ dengan asumsi harga beras standar adalah 6000,-/kg, maka garis kemiskinannya menjadi Rp. 3.144.000,- per rumah tangga, atau Rp. 806.200,- per bulan per kapita.³² Artinya, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila pendapatan perbulannya kurang dari Rp. 3.144.000,-, atau dalam konteks per kapita, seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang Rp. 806.200,- per bulan atau Rp. 26.873,- /hari (USD 3,13/hari).

Sementara itu, Tanjung³³ berpendapat bahwa nishab emas dapat dijadikan sebagai parameter garis kemiskinan syariah. Dengan menggunakan harga emas per gramnya adalah US\$ 50.34³⁴ atau setara dengan Rp 431.162,- (Rp 8.565 × 50.34), maka nilai 85 gram emas

²⁹. Nishab emas adalah 85 gram. Untuk menghitung garis kemiskinan rumah tangga maka nilai 85 gram emas dibagi 12 (bulan).

³⁰. Beik dan Baga menggunakan ukuran keluarga yang jumlahnya 3,9 orang. Hal ini sesuai dengan data BPS, berdasarkan sensus penduduk terbaru tahun 2010 bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 3,9 orang/rumah tangga.

³¹. Nishab beras zakat adalah senilai 524 kg beras.

³². Dengan ukuran keluarga yang jumlahnya 3,9 orang seperti tersebut di atas.

³³. Tanjung, Hendri, "Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011, hlm.62.

³⁴. Harga emas pada 13 Juli 2011

adalah sekitar Rp 36.648.770,-. Jika dibagi 12, maka diperoleh garis kemiskinan yang besarnya mencapai Rp. 3.054.000,- per bulan per rumah tangga.

Persoalannya, garis kemiskinan yang besarnya mencapai Rp. 3.054.000,- per bulan per rumah tangga tersebut untuk berapa orang dalam sebuah keluarga? Tanjung³⁵ berpendapat garis kemiskinan tersebut adalah untuk keluarga dengan jumlah anggotanya 5 orang. Hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi “*tazawwaju al waluuda wal waduuda, fa inni mukaatsirun bikum*”. Artinya “*nikahilah oleh kalian wanita yang berpotensi punya banyak anak dan penuh cinta kasih, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak*” (HR.Baihaqi dan Nasa’i).³⁶

Dalam hadits tersebut, kriteria ‘banyak’ (anak) dalam bahasa arab disebut jamak. Dan yang dikatakan jamak adalah tiga orang atau lebih. Sehingga, kalau diterjemahkan ke dalam keluarga, maka keluarga yang memiliki tiga orang anak akan disebut keluarga miskin jika penghasilan keluarga di bawah Rp. 3.054.000,- per bulan. Jika ini dibagi untuk 5 orang (satu suami, satu istri dan tiga orang anak), maka diperoleh garis kemiskinan rata-rata Rp 600.000,- per kapita per bulan.

Atas dasar hal di atas, Tanjung berpendapat bahwa garis kemiskinan tidak sama untuk semua keluarga. Garis kemiskinan bersifat relatif, bergantung kepada jumlah anak yang dimiliki. Jumlah anak dalam keluarga dianggap sebagai *proxy* dari jumlah kebutuhan. Semakin banyak jumlah anak, maka semakin tinggi pula garis kemiskinan keluarga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal ukuran keluarga, Beik dan Baga merujuk kepada data BPS. Sementara Tanjung merujuk kepada pemahaman hadits seperti yang tersebut di atas. Kedua pendekatan ini berimplikasi kepada perbedaan besarnya garis kemiskinan per kapita per bulan seperti yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa perhitungan dengan menggunakan standar nishab sebagai batasan garis kemiskinan jauh lebih mudah dan lebih rasional, bila dibandingkan dengan perhitungan BPS, BKKBN dan KEMENAKERTRANS. Hasil perhitungannya pun menunjukkan bahwa garis kemiskinan berbasis nishab nilainya lebih besar dari garis kemiskinan versi Bank Dunia. Namun demikian, menurut Beik,³⁷ ada hal yang harus diperhitungkan jika ingin menerapkan kebijakan nishab sebagai standar garis kemiskinan, yaitu akan adanya kekhawatiran dari sisi politik bahwa angka ini dapat meningkatkan jumlah orang miskin, sehingga dapat dianggap merugikan kepentingan penguasa.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, maka pilihan untuk menerapkan nishab sebagai garis kemiskinan merupakan pilihan yang tepat, karena memiliki orientasi keberpihakan yang kuat terhadap kaum dhuafa.³⁸

³⁵. Tanjung, Hendri, “Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal” artikel dalam buku “Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011, hlm.62.

³⁶. Sunan an-Nasai, tahqiq: ‘Abdul Fattah Abu Ghuddah, Halb; maktab al-mathbu’at al islamiyah 1986, cet.ke 2, juz 6, hlm 65, no hadits 3227.

³⁷. Beik, Irfan Syauqi & Baga, Lukman M, “Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa” artikel dalam buku “Bangsa Betah Miskin, Ciputat; IMZ 2011, hlm.10

³⁸. Ibid, hlm. 10.

KESIMPULAN

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan standar garis kemiskinan berdasarkan perspektif syariah ini, yaitu; **pertama**, pendekatan had al kifayah, dan **kedua**, pendekatan nishab zakat.

Pendekatan **Had al kifayah** satu konsep yang mendefinisikan batas kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas ini adalah pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh negara. Sedangkan pendekatan nishab zakat merupakan parameter penetapan status seseorang apakah menjadi muzaki ataupun menjadi mustahik. Karena itu maka kriteria nishab zakat dapat dipakai untuk menentukan batas kemiskinan. Nishab zakat digunakan bisa menggunakan nishab zakat emas dan perak ataupun nishab zakat pertanian.

REFERENSI

1. Sunan an-Nasai, tahqiq: 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, Halb; maktab al-mathbu'at al islamiyah, 1986, cet.ke 2, juz 6.
2. bps.go.id, Presentase Penduduk Miskin Maret 2020, dirilis pada 15-07-2020 dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin", Ciputat: IMZ 2011.
3. BPS 2011, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011.
4. IZDR 2012, Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna, Ciputat; IMZ 2012.
5. Nia Purnamasari "Analisis Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Studi Kasus: Pusat Zakat Umat LAZ Persis Garut)", Skripsi Pada FEM IPB 2010.
6. Tanjung, Hendri "Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011.
7. Tsani, Tiara, Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan), Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2010: tidak diterbitkan.
8. bps.go.id, Presentase Penduduk Miskin Maret 2020, dirilis pada 15-07-2020.